

Analisis Dampak Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Sisca Mediyanti

Accounting Study Program, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia
email: sisca.mediyanti@poltekkutaraja.ac.id

Abstrak, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) oleh Pemerintah Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Data dikumpulkan dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dalam kurun waktu tahun 2013-2018. Penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda untuk menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, variable X_1 (Dana Otonomi Khusus Provinsi) dan X_2 (Dana Otonomi Khusus Kabupaten) terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi), diketahui bahwa kedua variabel X tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Variabel X_1 (Dana Otonomi Khusus Provinsi) dan variabel X_2 (Dana Otonomi Khusus Kabupaten) tidak mempengaruhi variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi).

Kata kunci: Dana otonomi khusus, pertumbuhan ekonomi, otsus

Pendahuluan

Dalam persaingan yang terbuka dan kompetitif sebagai dampak dari globalisasi, pembangunan yang mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Pertumbuhan ekonomi tentunya membutuhkan indikator yang jelas sehingga dapat menggambarkan pasang surutnya perekonomian sebuah negara (Supriyanto, 2018). Perkembangan ekonomi yang begitu cepat membuat masyarakat lebih kritis dalam berfikir untuk mengikuti perkembangan informasi ekonomi. Salah satu informasi yang digunakan adalah informasi keuangan (Wardayani & Wahyuni, 2016). Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Umar, 2016). Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan otonomi khusus yang perkembangannya cukup signifikan. Pemberlakuan Aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan berpedoman pada UU No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan UU No 11 tahun 2006 (Sukirno, 1996). Aceh diberikan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh untuk jangka waktu 20 tahun, dana Otsus tahun pertama sampai kelima belas adalah 2 % dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, kemudian pada tahun ke lima belas hingga kedua puluh adalah 1% dari plafon DAU nasional. Penggunaan dana otonomi khusus yang dipakai untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat di harapkan dapat mendongkrak sektor-sektor ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju

perekonomian yang terus meningkat dan dinamis yang bercirikan ekonomi yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh, serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang berpotensi besar.

Tinjauan

Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat daerah (Setyorini et al., 2019). Pertumbuhan ekonomi Aceh (tanpa migas) dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir masih berkutat pada level 4 persen, ini dikarenakan PDRB Aceh masih bergantung di sektor pertanian, belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh terlihat pada tahun 2010 yaitu 6,02 dan tahun 2012 sebesar 5,02, setelah itu pertumbuhan ekonomi menurun di tahun 2013 dengan nilai sebesar 4,15 persen dan di tahun 2018 hanya naik sedikit pada level 4,49 persen. Berdasarkan alokasi dana otonomi khusus baik otonomi khusus provinsi maupun otonomi khusus kabupaten dan kota, Pemerintah Aceh dalam hal ini dapat merencanakan pembangunan ekonomi yang diprioritaskan, alokasi dana tersebut ditujukan untuk dapat meningkatkan sektor ekonomi daerah serta memacu potensi-potensi sumber daya lainnya yang dimiliki oleh daerah. Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan (Sukirno, 1996). Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Guna mengurangi kesenjangan pembangunan di daerah, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan, pemerintah menggelontorkan dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua, Provinsi Aceh dan guna mengurangi kesenjangan pembangunan di daerah, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendidikan, pemerintah menggelontorkan dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua, Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat serta dana keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang besarnya berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan APBN. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Ulfah et al., 2019). Salah satu strategi dalam peningkatan aspek ekonomi adalah program peningkatan kesejahteraan dengan pembuatan dan pemberdayaan aspek-aspek ekonomi (Suryaningsum et al., 2016).

Metode

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder atau mengambil data yang sudah tersedia di instansi tertentu yang sesuai dengan jenis penelitian dan dalam penelitian ini mengambil data dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan dari badan pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh serta dari berbagai sumber referensi lainnya. Metode pengambilan data skunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian

ini mengambil data dari APBD provinsi Aceh khususnya penggunaan dana Otsus tahun 2013 sampai 2018 dan statistik PDRB pada tahun yang sama.

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 1992). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003). Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresi yaitu dengan analisis Least Squares (kuadrat terkecil) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan. Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006). Pada penelitian ini, dua komponen dari dana otsus Provinsi dan dana otsus Kab/Kota akan dianalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple linear regression). Data diolah dengan perangkat lunak pengolah data. Teknik ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil dan pembahasan

Hasil uji data seperti pada Tabel 1, secara serempak variabel X_1 (dana otonomi khusus provinsi) dan X_2 (dana otonomi khusus kabupaten dan kota) terhadap terhadap variabel Y (pertumbuhan ekonomi), diketahui bahwa kedua variabel X tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari p value sebesar 0,851 dan 0,338 atau lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi versus Otsus Provinsi

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	5,5766	0,9761	5,71	0,002
Otsus Provinsi	-0,0000000	0,0000000	-0,20	0,851
Otsus Kab/Kota	-0,0000000	0,0000000	-1,06	0,338

Hasil uji data secara parsial variabel X_1 (dana otonomi khusus provinsi), seperti pada Tabel 2 diperoleh nilai p value sebesar 0,434 atau lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Selanjutnya seperti pada Tabel 3 diketahui hasil uji parsial variabel X_2 (dana otonomi khusus kabupaten dan kota), diperoleh nilai p value sebesar 0,194 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Sehingga secara parsial baik variabel X_1 (dana otonomi khusus provinsi) dan X_2 (dana otonomi khusus kabupaten dan kota), tidak berpengaruh terhadap variabel Y (pertumbuhan ekonomi).

Tabel 2. Hasil Uji Parsial Pertumbuhan Ekonomi versus Otsus Provinsi

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	4,5968	0,3120	14,73	0,000
Otsus Provinsi	-0,00000000	0,00000000	-0,84	0,434

Tabel 3. Hasil Uji Parsial Pertumbuhan Ekonomi versus Otsus Kabupaten/Kota

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	5,6190	0,8728	6,44	0,001
Otsus Kab/Kota	-0,00000000	0,00000000	-1,46	0,194

Berdasarkan hasil uji data dan analisis data, dapat dinyatakan bahwa alokasi penggunaan dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh baik melalui otonomi khusus provinsi maupun alokasi otonomi khusus kabupaten dan kota belum bisa memacu pertumbuhan ekonomi secara signifikan, hal ini dikarenakan, meski pengalokasian dana otonomi khusus kepada pemerintah Aceh baik otsus Aceh maupun otonomi khusus kabupaten dan kota yang terus naik dan tumbuh setiap tahunnya tidak berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi bahkan, pertumbuhan ekonomi seakan tidak terpengaruh dengan perubahan alokasi anggaran dari belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Kondisi ini bisa terjadi, salah satunya adalah kebijakan yang diambil dalam pengalokasian dana otsus terhadap anggaran belanja pemerintah yang tidak terfokus pada sektor-sektor perekonomian yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penelitian ini merupakan satu studi mengenai analisis dampak penggunaan dana otonomi khusus provinsi dan dana otonomi khusus kabupaten dan kota pada pemerintah Aceh yang diproyeksikan dalam rasio belanja pembangunan terhadap PDRB, serta menguji pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengujian yang dilakukan rasio penggunaan dana otonomi khusus baik provinsi maupun kabupaten dan kota terhadap PDRB, ratio pertumbuhan penggunaan dana otonomi khusus tidak mempunyai pengaruh langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Daftar pustaka

- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi "Analisis Multivariate dengan Program SPSS"*. Semarang: BPFE Undip.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometri Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Sekaran, U. (1992). *Research methods for business* (3rd ed.). Illionis: John Wiley & Sons.
- Setyorini, R., Achmad Daengs, G. S., Mahjudin, Reni, A., Susilo, D. E., & Hidayat, R. (2019). Knowledge management of financial performance for tax amnesty policy. *Journal of Physics: Conference Series*, 1175(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1175/1/012215>
- Sukirno, S. (1996). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: LPFE UI dengan Bina Grafika.

- Supriyanto, S. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pendapatan Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bis-A: Jurnal Bisnis Administrasi*, 2(1), 39–53.
- Suryaningsum, S., Effendi, M. I., Gusaptono, R. H., Suryana, B. A., Udjiyanto, D. W., Susanto, J., ... Kusumawardhani, I. (2016). Tata Kelola Ekonomi Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN Dan Meningkatkan Martabat Bangsa Berbasis Sumber Daya Energi Dan Memperkokoh Sinergi Penelitian Antar Pemerintah, Industri & Perguruan Tinggi. *Seminar Nasional Tahun Ke-2, Call Paper, Dan Pameran Hasil Penelitian & Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti RI*. Yogyakarta: LPPM UPNVY Press.
- Ulfah, A. K., Fernanda, D., Rahmaniar, R., Mediyanti, S., Agustina, A., Azlina, A., & Andina, A. (2019). Analisis Kemampuan Pembiayaan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Penerapan Revisi UU Tentang Otonomi Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 113–116. Medan: Seminar id.
- Umar, Z. (2016). Analisis Realisasi Anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh Tahun 2014. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(1), 18–32.
- Wardayani, W., & Wahyuni, D. S. (2016). Analisis Return on Asset, Current Ratio dan Debt Ratio dalam Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Belawan. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(1), 59–73.